



## Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional

Nathaniela Gracia Amanda Putri<sup>1</sup>, Florista Dea Avita<sup>2</sup>, Henderina Julia Vindi Putri<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Januari 1, 2024  
Revised Januari 2, 2024  
Accepted Januari 2, 2024

#### Kata Kunci:

Perlindungan HAM,  
Hukum Internasional,  
Norma,  
Pemerintah

#### Keywords:

Human Rights Protection,  
International Law,  
Norms,  
Government

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional, mengeksplorasi evolusi norma dan implementasi hak asasi manusia sejalan dengan perubahan dinamika global. Melalui metode penelitian studi literatur, penelitian ini menganalisis peran lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, tantangan-tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini menginvestigasi peran masyarakat sipil dan LSM dalam mendukung dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menggambarkan kontribusi mereka dalam mendorong kesadaran publik, memberikan bantuan hukum, dan menjadi suara kritis dalam advokasi hak asasi manusia. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kompleks perlindungan hak asasi manusia dalam ranah hukum internasional dan merangsang pertimbangan untuk perbaikan lebih lanjut dalam kerangka kerja hukum ini.

### ABSTRACT

*This research aims to understand the protection of human rights in the context of international law, exploring the evolution of norms and implementation of human rights in line with changing global dynamics. Using literature study research methods, this research analyzes the role of international human rights institutions, the challenges they face, and their impact on the protection of human rights in various countries. In addition, this research investigates the role of civil society and NGOs in supporting and strengthening human rights protection, illustrating their contribution in promoting public awareness, providing legal assistance, and being a critical voice in human rights advocacy. The results of this research provide an in-depth understanding of the complex dynamics of human rights protection in the realm of international law and stimulate consideration of further improvements in this legal framework.*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Nuriah Sari Dewi  
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional,  
Surabaya, Indonesia  
Email: [humas@upnjatim.ac.id](mailto:humas@upnjatim.ac.id)

## **1. PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip dasar yang mengakui setiap individu memiliki hak-hak inheren dan tidak dapat dicabut, hanya karena mereka adalah manusia. Perlindungan hak asasi manusia diakui sebagai suatu kebutuhan mendesak dalam masyarakat internasional guna mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan global. Hukum internasional telah menjadi landasan utama untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Hukum internasional menyediakan kerangka kerja yang mencakup berbagai instrumen dan mekanisme untuk melindungi hak asasi manusia. Salah satu dokumen utama dalam hal ini adalah Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan ini mencakup prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta hak untuk tidak disiksa atau dianiaya [1].

Selain Pernyataan Universal, terdapat pula instrumen-instrumen hukum internasional lainnya, seperti Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Instrumen-instrumen ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun terdapat kerangka kerja hukum yang kuat, tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia tetap ada. Beberapa tantangan tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia oleh negara-negara atau aktor non-negara, kurangnya penegakan hukum internasional yang efektif, serta ketidaksetaraan dalam perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara.

Isu-isu baru seperti teknologi informasi dan perubahan iklim juga telah menantang pandangan dan pendekatan dalam perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk terus berkolaborasi dan mengembangkan strategi baru untuk mengatasi tantangan ini. Keterlibatan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci penting dalam melanjutkan upaya perlindungan hak asasi manusia. Partisipasi aktif dari kelompok-kelompok ini dapat memberikan tekanan, pengawasan, dan advokasi yang diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan meningkatnya akses informasi dan globalisasi, masyarakat sipil memiliki peran yang semakin signifikan dalam memobilisasi dukungan publik, menyuarakan isu-isu hak asasi manusia, dan memantau pelaksanaan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia [2].

Organisasi non-pemerintah (NGO) juga memiliki peran yang krusial dalam menyebarluaskan informasi, memberikan bantuan hukum kepada individu yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, serta berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara global. Kehadiran aktor-aktor non-pemerintah ini memperkaya dan memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia di luar ranah pemerintahan. Sektor swasta juga memiliki tanggung jawab etis dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia diharapkan untuk menghormati hak-hak pekerja, mencegah dampak negatif terhadap masyarakat lokal, dan memastikan keberlanjutan usaha mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Inisiatif seperti Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) memberikan landasan bagi perusahaan untuk memainkan peran positif dalam memastikan hak asasi manusia terlindungi dalam konteks bisnis global [3].

Namun, meskipun terdapat upaya-upaya positif, tantangan besar masih ada dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Beberapa negara mungkin tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban-kewajiban hak asasi manusia mereka, dan konflik-konflik berskala besar sering kali mengakibatkan dampak serius terhadap hak asasi manusia. Kerja sama antarnegara, penguatan lembaga-lembaga internasional, dan peningkatan kesadaran global tetap menjadi langkah-langkah kunci dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional. Hanya melalui upaya bersama ini, dunia dapat mencapai visi universal mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua individu, tanpa memandang asal, jenis kelamin, agama, atau latar belakang lainnya.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, peran lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sangat penting. PBB memiliki peran utama dalam menetapkan standar global mengenai hak asasi manusia, mengoordinasikan upaya internasional, serta memberikan platform bagi negara-negara untuk berdialog dan bersama-sama mencari solusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB membantu memantau dan mengevaluasi implementasi instrumen-instrumen hak asasi manusia serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan potensi besar dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Akses terhadap informasi secara cepat dan luas memungkinkan masyarakat untuk lebih efektif memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Media sosial dan platform daring memberikan wadah bagi suara individu dan kelompok untuk disuarakan, menciptakan tekanan publik yang dapat mempengaruhi tindakan pemerintah dan aktor lainnya [4].

Tantangan terus muncul, terutama terkait dengan situasi krisis dan konflik yang seringkali menjadi penyebab utama pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat internasional perlu terus berupaya meningkatkan respons terhadap situasi-situasi ini, baik melalui diplomasi perdamaian maupun dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang memadai. Perlu ditekankan bahwa keberhasilan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya terletak pada perumusan dan penegakan norma, tetapi juga pada kesediaan aktor-aktor internasional untuk bekerja sama secara efektif. Solidaritas global dan kerjasama lintas batas menjadi landasan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia diakui, dihormati, dan dijalankan oleh semua negara tanpa pengecualian. Dalam konteks hukum internasional, kesadaran akan pentingnya kerjasama ini menjadi kunci dalam menjamin masa depan yang lebih adil dan beradab bagi seluruh umat manusia.

Oleh karena itu, memperkuat sistem hukum internasional dan mekanisme penegakan hukum menjadi langkah krusial dalam menanggulangi tantangan yang terus berkembang terkait hak asasi manusia. Negara-negara perlu bersatu untuk memperkuat norma-norma hak asasi manusia, mengevaluasi instrumen hukum yang sudah ada, dan menyusun peraturan baru yang dapat mengatasi isu-isu kontemporer. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia juga memiliki peran sentral dalam membangun fondasi yang kuat untuk perlindungan hak asasi manusia. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak mereka, individu dapat lebih efektif mempertahankan hak-hak mereka sendiri dan memberikan kontribusi positif dalam mendorong perubahan sosial.

Peran akademisi, peneliti, dan advokat hak asasi manusia juga sangat diperlukan dalam menyuarakan isu-isu penting, melakukan penelitian mendalam, dan memberikan solusi

inovatif. Dengan melibatkan pemikiran kritis dan analisis mendalam, mereka dapat membantu membentuk kebijakan dan praktik-praktik yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional adalah perjuangan yang terus menerus dan memerlukan komitmen bersama. Dengan menjaga momentum kolaborasi internasional, meningkatkan penegakan hukum, dan mempromosikan pendidikan hak asasi manusia, dunia dapat menuju pada masa depan di mana setiap individu dapat menikmati hak-haknya tanpa takut akan pelanggaran atau diskriminasi. Hanya dengan tekad bersama dan upaya berkelanjutan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan menghormati martabat setiap manusia.

## **2. METODE**

Metode penelitian studi literatur merupakan pendekatan yang mendalam dan analitis dalam menggali dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan suatu topik penelitian. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional, studi literatur memiliki peran penting dalam menyelidiki evolusi, implementasi, dan tantangan yang dihadapi oleh kerangka hukum internasional terkait hak asasi manusia. Penelitian ini memulai proses dengan mengidentifikasi sumber-sumber literatur kunci seperti konvensi internasional, pernyataan universal, serta makalah dan buku dari para pakar hukum internasional. Analisis awal melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap landasan hukum dan norma-norma hak asasi manusia yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut [5].

Langkah berikutnya adalah mengkaji implementasi dan penegakan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional. Ini mencakup pemeriksaan laporan negara-negara terkait dengan pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia. Penelitian juga dapat melibatkan analisis terhadap putusan-putusan badan peradilan internasional yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selama proses studi literatur, pencarian dan penelaahan terus dilakukan untuk mengidentifikasi tren, isu-isu kontemporer, dan perdebatan akademis dalam perlindungan hak asasi manusia. Studi ini juga dapat mencakup literatur yang mengulas dampak teknologi dan globalisasi terhadap hak asasi manusia serta upaya-upaya inovatif yang diambil dalam menanggapi perubahan tersebut

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Internasional**

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Internasional menjadi suatu aspek krusial dalam menciptakan tatanan global yang adil dan manusiawi. Hukum internasional telah membentuk kerangka kerja yang mengatur hak asasi manusia melalui berbagai instrumen hukum, seperti Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Evokasi perlindungan hak asasi manusia di dunia internasional bermula dari prinsip-prinsip dasar, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, hingga hak untuk tidak disiksa atau dianiaya. Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB menjadi lembaga-lembaga penting dalam pemantauan dan penilaian pelaksanaan hak asasi manusia oleh negara-negara anggota [6].

Sejalan dengan kemajuan zaman, tantangan terkini seperti dampak teknologi informasi dan globalisasi menantang respons hukum internasional dalam melindungi hak asasi manusia.

Keberadaan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci dalam mendukung upaya perlindungan ini, melalui advokasi, pemantauan, dan memberikan bantuan hukum kepada individu yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat nasional juga menjadi sorotan, dengan penilaian terhadap sejauh mana negara-negara memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang telah mereka ratifikasi. Implementasi ini dapat mencerminkan sejauh mana negara-negara melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menjaga keadilan, dan memberikan akses yang setara kepada semua warganya.

Dalam menghadapi dinamika kompleks tersebut, penting untuk mengakui bahwa perlindungan hak asasi manusia bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah semata. Peran sektor swasta juga menjadi signifikan, dengan kebijakan bisnis yang bertanggung jawab dan dukungan terhadap inisiatif hak asasi manusia. Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia memberikan kerangka kerja yang mengikat bagi perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dalam operasional bisnis mereka, untuk terus menggali dan mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, terutama di negara-negara berkembang. Bantuan internasional dan kemitraan global dapat memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas institusi dan memfasilitasi transfer pengetahuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional.

Tantangan masih terus ada, dan peningkatan upaya perlu dilakukan untuk mengatasi impunitas dalam pelanggaran hak asasi manusia. Reformasi lembaga-lembaga internasional dan nasional menjadi suatu langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan akuntabilitas. sambil terus memperjuangkan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional, kita perlu menjaga semangat kolaborasi dan kesadaran global. Hanya dengan bersama-sama, dunia dapat membentuk masyarakat internasional yang lebih adil, setara, dan menghormati hak asasi manusia untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang atau posisi sosial mereka.

Selain itu, mendukung pendekatan holistik yang memasukkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan budaya juga merupakan langkah kunci dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Pemberdayaan perempuan, peningkatan pendidikan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan di mana hak asasi manusia dihormati dan dilindungi secara menyeluruh, mekanisme penyelesaian sengketa internasional, seperti Pengadilan Internasional dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas. Mendukung kredibilitas dan independensi lembaga-lembaga ini dapat memperkuat keyakinan masyarakat internasional terhadap penegakan hak asasi manusia.

Edukasi publik dan kampanye penyuluhan menjadi instrumen penting dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait hak asasi manusia. Meningkatkan pemahaman akan hak-hak dasar setiap individu dapat membentuk opini publik yang mendukung perubahan kebijakan dan tindakan nyata dalam melindungi hak asasi manusia. untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional memerlukan keterlibatan lintas sektor, komitmen global, dan aksi konkret dari semua pihak. Hanya melalui kerjasama yang kokoh dan konsisten, kita dapat menciptakan panggung global yang memberdayakan setiap individu untuk menjalani hidup dengan martabat dan tanpa takut akan pelanggaran hak asasinya.

Kerangka kerja hukum internasional yang lebih efektif dan responsif menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika kompleks dan perubahan zaman. Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat peran lembaga-lembaga hak asasi manusia, meningkatkan koordinasi antarnegara, dan mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang lebih tangguh. Dalam konteks ini, integrasi hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan praktik bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi langkah strategis. Pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan lembaga-lembaga finansial, harus bersama-sama mendorong standar etis dan praktik bisnis yang mendukung hak asasi manusia.

Selain itu, peningkatan kerja sama internasional dalam hal pertukaran informasi, pelatihan, dan sumber daya dapat memperkuat kapasitas negara-negara dalam melaksanakan komitmen hak asasi manusia mereka. Dukungan finansial dan teknis dari lembaga-lembaga internasional juga diperlukan untuk memastikan bahwa negara-negara memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi standar hak asasi manusia. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga pengawas, seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB, perlu didorong untuk memastikan bahwa negara-negara anggota mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka. Mekanisme evaluasi yang transparan dan obyektif perlu diintensifkan, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pemantauan.

Mendorong negara-negara untuk meratifikasi dan mematuhi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang ada, sekaligus mendukung pengembangan instrumen baru yang sesuai dengan dinamika sosial dan teknologis terkini, merupakan upaya penting dalam memperbaiki kerangka kerja hukum internasional. diplomasi multilateral juga harus menjadi fokus dalam mempromosikan perlindungan hak asasi manusia. Negosiasi dan dialog antarnegara dapat menjadi sarana efektif untuk membangun konsensus global dalam mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peningkatan keterlibatan masyarakat internasional dalam menyelesaikan konflik dan krisis kemanusiaan juga menjadi bagian integral dari upaya melindungi hak asasi manusia di tingkat global. Dalam era yang terus berkembang, keberlanjutan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional memerlukan adaptasi terhadap perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat internasional perlu secara proaktif terlibat dalam pembaharuan dan penguatan sistem perlindungan hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu tetap terlindungi, dihormati, dan diperjuangkan secara universal [7].

### **3.2 Evolusi hukum internasional terkait perlindungan hak asasi manusia dari waktu ke waktu, khususnya dalam konteks perubahan norma dan implementasinya**

Evolusi hukum internasional terkait perlindungan hak asasi manusia sepanjang waktu telah mencerminkan perjalanan panjang dan dinamis dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Puncaknya dicapai dengan lahirnya Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang menjadi tonggak penting dalam membentuk fondasi perlindungan hak asasi manusia di lingkup global. Dokumen ini, bersama dengan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), menjadi bendera hukum internasional untuk melindungi hak-hak dasar individu [8].

Seiring berjalannya waktu, norma-norma dan prinsip hak asasi manusia mengalami perubahan signifikan sejalan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah dan perubahan sosial. Era

pasca-Perang Dunia II menciptakan momentum kuat untuk mendefinisikan kembali hak asasi manusia sebagai prinsip dasar yang tidak dapat dicabut. Perubahan norma ini tercermin dalam pertumbuhan jumlah instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia, menunjukkan evolusi pemahaman dan pengakuan terhadap hak-hak individu. Selain itu, perubahan norma hak asasi manusia juga tercermin dalam semakin meningkatnya peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam menyuarakan isu-isu hak asasi manusia. Gerakan hak asasi manusia telah menjadi kekuatan penggerak perubahan, memaksa negara-negara untuk lebih memperhatikan pelanggaran hak asasi manusia dan meresponsnya dengan tindakan konkrit.

Meskipun evolusi ini menggambarkan kemajuan yang signifikan, tantangan baru terus muncul. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan isu-isu lingkungan membawa kompleksitas baru dalam kerangka kerja hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum internasional terus beradaptasi dan berusaha mengatasi tantangan baru ini melalui perubahan norma, mekanisme penegakan hukum, dan upaya kolaboratif di tingkat internasional. Dengan demikian, evolusi hukum internasional terkait hak asasi manusia adalah refleksi dari upaya berkelanjutan untuk menjaga dan memajukan martabat manusia di seluruh dunia.

Perubahan norma dan implementasi hak asasi manusia di dalam kerangka hukum internasional juga terus berkembang sejalan dengan peningkatan kesadaran akan inklusivitas dan non-diskriminasi. Dalam beberapa dekade terakhir, pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas, perempuan, dan kelompok LGBTI telah menjadi pusat perhatian, menggambarkan evolusi pemahaman hak asasi manusia yang lebih luas dan mendalam. Dengan munculnya sistem perlindungan hak asasi manusia di berbagai benua. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Afrika, dan Inter-American Court of Human Rights menjadi contoh mekanisme regional yang memberikan tambahan dimensi dan kekhususan dalam perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Namun, kendati ada kemajuan yang signifikan, tantangan tetap ada, terutama dalam penegakan hukum dan akuntabilitas. Adopsi norma hak asasi manusia tidak selalu diikuti oleh implementasi yang efektif di tingkat nasional. Impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia sering kali menantang integritas dan keberlanjutan dari kerangka kerja hukum internasional ini. sambil mengakui perubahan signifikan dalam norma dan implementasi hak asasi manusia, perlu adanya tekad bersama untuk terus memperkuat dan menyempurnakan kerangka kerja hukum internasional. Melalui kerja sama antarnegara, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia, dunia dapat bergerak maju menuju realisasi penuh prinsip-prinsip kemanusiaan, menciptakan tatanan global yang lebih adil, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua.

Perkembangan ini juga mencerminkan semakin pentingnya mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam menilai kepatuhan negara-negara terhadap standar hak asasi manusia. Badan-badan seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan lembaga-lembaga serupa di tingkat regional memainkan peran vital dalam memastikan implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Proses periodik peninjauan negara-negara anggota untuk mengevaluasi pencapaian mereka dan memberikan rekomendasi konstruktif menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, evolusi hukum internasional terkait hak asasi manusia mencerminkan transisi dari pendekatan yang lebih statis menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap isu-isu

kontemporer. Dampak globalisasi, terutama melalui media sosial dan pertukaran informasi instan, telah membawa kesadaran akan pelanggaran hak asasi manusia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat sipil yang semakin terhubung dan sadar akan hak-hak mereka berkontribusi pada peningkatan tekanan publik terhadap pemerintah dan aktor lainnya untuk mematuhi norma-norma hak asasi manusia.

Tantangan di era digital juga membawa kompleksitas baru dalam melindungi privasi dan keamanan individu. Oleh karena itu, evolusi hukum internasional terus berlangsung untuk mengadaptasi kerangka kerja hak asasi manusia ke dalam dinamika teknologi dan perubahan sosial. evolusi hukum internasional terkait hak asasi manusia mencerminkan perjalanan yang terus berubah, memperkuat dan menyempurnakan fondasi hak asasi manusia di panggung global. Dengan tetap fokus pada universalitas, inklusivitas, dan penegakan hukum, dunia dapat memandu evolusi ini menuju masa depan yang lebih terang, di mana hak asasi manusia diakui, dihormati, dan dilindungi secara merata bagi semua individu di seluruh dunia.

Evolusi ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan panggilan untuk komitmen yang terus-menerus dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan norma dan implementasi hukum internasional harus selalu merespon dinamika masyarakat global yang terus berkembang. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dari negara-negara, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan agar evolusi ini tidak hanya menjadi deklarasi tanpa tindakan nyata.

Tantangan baru, seperti perubahan iklim, konflik berbasis teknologi, dan krisis kemanusiaan, menegaskan perlunya terus memperbaiki instrumen hukum dan mekanisme penegakan hak asasi manusia. Perluasan wawasan hak asasi manusia ke dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan juga menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam menghadapi masa depan, penguatan pendidikan hak asasi manusia dan keterlibatan aktif generasi muda menjadi kunci dalam membentuk sikap dan perilaku yang mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan membangun pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang efektif, memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi fokus utama agenda global. Dunia dapat membimbing evolusi hukum internasional terkait hak asasi manusia menuju realisasi visi universal: sebuah dunia di mana setiap individu, tanpa kecuali, dapat hidup dalam martabat, kebebasan, dan keadilan. Hanya dengan upaya bersama dan dedikasi terus-menerus, kita dapat mencapai tujuan ini dan mewariskan masa depan yang lebih berharga bagi generasi mendatang.

### **3.3 Tantangan utama yang dihadapi lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia di berbagai negara**

Tantangan utama yang dihadapi lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia di berbagai negara melibatkan kompleksitas politik, hukum, dan sosial yang mempengaruhi implementasi dan penegakan norma hak asasi manusia. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kekuatan penegakan hukum lembaga-lembaga ini, terutama ketika negara-negara anggota tidak sepenuhnya kooperatif atau bahkan menentang upaya-upaya ini. Terdapat kendala dalam hal kemandirian dan independensi lembaga-lembaga hak asasi manusia. Beberapa negara memiliki resistensi terhadap campur tangan eksternal dalam urusan domestik mereka, menyulitkan upaya lembaga-lembaga tersebut

dalam memonitor dan menilai pelanggaran hak asasi manusia di dalam batas-batas suatu negara. Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga hak asasi manusia juga dapat menghadapi tekanan politik yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk bertindak secara bebas [9].

Impunitas sering kali menjadi tantangan yang sulit diatasi. Meskipun lembaga-lembaga ini dapat mengeluarkan putusan atau merekomendasikan tindakan, implementasi dan penegakan keputusan ini seringkali terkendala oleh kelemahan sistem peradilan nasional atau kurangnya sanksi yang efektif. Kurangnya mekanisme penegakan dapat membuat putusan hak asasi manusia menjadi terbatas dalam dampak praktisnya. Situasi krisis kemanusiaan dan konflik berskala besar dapat memperumit upaya lembaga-lembaga hak asasi manusia. Dalam situasi konflik, akses ke daerah yang terkena dampak dan risiko keselamatan bagi para penyelidik hak asasi manusia dapat menjadi kendala serius, menghambat pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia.

Lembaga-lembaga hak asasi manusia juga dihadapkan pada tantangan dalam menanggapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Keamanan siber, pengawasan elektronik, dan penyalahgunaan teknologi lainnya dapat menciptakan celah dalam perlindungan hak asasi manusia, memerlukan pembaruan dan adaptasi konstan dalam perangkat hukum dan mekanisme pemantauan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dihormati dan diterapkan di seluruh dunia. Diperlukan kerja sama global, upaya kolaboratif antarlembaga, dan dukungan luas dari masyarakat sipil untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memajukan perlindungan hak asasi manusia secara global.

Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan divergensi normatif dan budaya di antara negara-negara anggota juga menjadi hambatan signifikan. Interpretasi yang berbeda terhadap nilai dan hak asasi manusia dapat mengakibatkan ketidaksetujuan dalam mengenai keabsahan dan prioritas hak-hak tertentu. Hal ini menciptakan dinamika kompleks di mana lembaga-lembaga hak asasi manusia harus menavigasi tantangan diplomatis dan seni taktis agar tetap relevan dan efektif. Tantangan keseimbangan kekuasaan juga muncul ketika lembaga-lembaga hak asasi manusia dihadapkan pada negara-negara yang memiliki pengaruh besar secara politik dan ekonomi. Adanya tekanan politik untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia atau menghambat penyelidikan dapat merusak integritas dan tujuan utama lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian dan tekad kuat untuk menghadapi tekanan eksternal dan memastikan ketidakberpihakan dalam penanganan kasus hak asasi manusia.

Lembaga-lembaga hak asasi manusia seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun personel. Pengelolaan volume besar kasus dan tantangan multidimensi hak asasi manusia di berbagai negara menuntut sumber daya yang cukup untuk memastikan penyelidikan mendalam dan respons yang cepat. Melalui pemahaman mendalam terhadap tantangan-tantangan tersebut, lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional dapat terus memperkuat peran mereka dengan merancang strategi yang cerdas, membangun kemitraan yang efektif, dan meningkatkan kapasitas internal. Keterlibatan masyarakat sipil, media, dan dukungan internasional juga menjadi kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa lembaga-lembaga hak asasi manusia dapat menjalankan mandat mereka dengan integritas dan dampak positif di panggung global.

Tantangan substansial juga muncul dari kurangnya konsistensi dan penegakan hukum yang adil di tingkat nasional. Beberapa negara mungkin tidak memiliki sistem peradilan yang kuat atau mungkin enggan mengakui yurisdiksi lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap putusan dan rekomendasi, mengurangi efektivitas penegakan dan memberikan sinyal bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, penting untuk meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga hak asasi manusia, serta memperkuat mekanisme kerjasama internasional. Mendukung pembentukan dan penguatan lembaga hak asasi manusia di tingkat nasional juga menjadi strategi penting untuk memastikan penegakan hak asasi manusia yang lebih efektif di tingkat lokal.

Keberhasilan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional dalam menanggulangi tantangan-tantangan ini juga bergantung pada partisipasi aktif dari negara-negara anggota dan ketersediaan mereka untuk berkolaborasi secara konstruktif. Di samping itu, upaya diplomasi yang bijaksana, dukungan masyarakat internasional, dan advokasi yang kuat dari organisasi non-pemerintah dapat membantu menciptakan tekanan dan kesadaran yang diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan hak asasi manusia yang bersifat sistemik dan mendalam.

### **3.4 Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional**

Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) menjadi krusial dalam mendukung dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Masyarakat sipil, dengan keanggotaan yang mencakup kelompok advokasi, aktivis hak asasi manusia, dan individu yang peduli, memiliki potensi untuk menjadi kekuatan pengubah game dalam memastikan pematuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia di seluruh dunia. Masyarakat sipil berperan sebagai penjaga dan pengawas, mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia oleh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional. Mereka berperan sebagai mata dan telinga di lapangan, memberikan informasi dan laporan yang mendetail mengenai pelanggaran hak asasi manusia. LSM memiliki peran penting dalam memobilisasi dukungan publik, menyuarakan isu-isu hak asasi manusia, dan menciptakan tekanan moral dan politik pada pemerintah untuk bertindak [10].

LSM dapat memberikan bantuan hukum kepada individu yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menyediakan dukungan hukum, advokasi, dan perlindungan kepada individu atau kelompok yang terancam atau telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Bantuan ini mencakup pembelaan di pengadilan, advokasi hak-hak korbannya, dan memastikan bahwa suara mereka didengar di tingkat internasional. Peran LSM melibatkan advokasi dan kampanye di tingkat internasional untuk mempromosikan norma dan prinsip hak asasi manusia. Mereka berpartisipasi dalam forum-forum internasional, seperti sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, untuk menyuarakan isu-isu hak asasi manusia dan memastikan bahwa perhatian global tetap terfokus pada pelanggaran yang mungkin terjadi di negara-negara tertentu.

LSM juga berperan sebagai jembatan antara individu dan lembaga-lembaga internasional. Mereka membantu menghubungkan korban pelanggaran hak asasi manusia dengan mekanisme penegakan hukum internasional, seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atau Dewan Hak Asasi Manusia PBB, memastikan bahwa suara individu tidak terdengar sebagai keluhan

terisolasi, melainkan sebagai seruan universal untuk keadilan. Dengan berperan aktif dalam penguatan kapasitas masyarakat sipil dan LSM, dunia dapat membangun gerakan global yang lebih kuat dan efektif dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Keberanian dan kemandirian masyarakat sipil serta LSM menjadi elemen utama dalam menjamin bahwa hak asasi manusia diakui, dihormati, dan dilindungi secara universal.

Masyarakat sipil dan LSM memiliki peran strategis dalam mendesak pemerintah untuk mengadopsi dan melaksanakan kebijakan yang mendukung hak asasi manusia. Mereka menyediakan analisis independen, mengidentifikasi kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan mengusulkan solusi konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Melalui riset, pemantauan, dan publikasi laporan, masyarakat sipil dan LSM memberikan kontribusi substansial dalam membentuk opini publik dan memotivasi tindakan positif dari pemerintah.

Selain itu, peran pendidikan dan advokasi masyarakat sipil tidak dapat diabaikan. Mereka berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, mengedukasi individu tentang hak-hak mereka, dan membangun kapasitas untuk bertindak dalam mempertahankan hak-hak tersebut. Program pendidikan dan advokasi seperti ini tidak hanya menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi tetapi juga membentuk basis yang kuat untuk partisipasi aktif dalam pemantauan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam lingkup internasional, LSM berperan sebagai pelobi penting, menekankan perlunya kerja sama antarbangsa dalam perlindungan hak asasi manusia. Mereka dapat memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara, menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam hubungan diplomatik, dan memperkuat kerja sama regional dan global dalam mendorong perubahan positif. masyarakat sipil dan LSM tidak hanya menjadi saksi dan penjaga, tetapi juga agen perubahan yang memberdayakan individu untuk menuntut keadilan dan melibatkan diri dalam proses pembangunan yang inklusif. Peran kritis mereka dalam mendukung dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional memperkuat fondasi nilai kemanusiaan dan keadilan di seluruh dunia.

Peran masyarakat sipil dan LSM semakin penting sebagai penjaga dan katalisator perubahan. Mereka dapat melibatkan diri dalam dialog antarbudaya, mempromosikan inklusivitas, dan membangun jaringan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan hak asasi manusia yang bersifat lintas batas. Kolaborasi ini menciptakan momentum positif dalam mencapai tujuan bersama, yaitu perlindungan hak asasi manusia secara universal. masyarakat sipil dan LSM tidak hanya berperan sebagai kritikus pemerintah, tetapi juga sebagai mitra yang konstruktif. Mereka dapat berkontribusi dalam merancang kebijakan yang lebih berpihak pada hak asasi manusia, memberikan saran teknis, dan mendukung implementasi solusi yang efektif. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi kontrol eksternal, tetapi juga pemain aktif dalam membangun sistem yang lebih adil dan inklusif.

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan krisis kemanusiaan, masyarakat sipil dan LSM memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa respons internasional didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan menyuarakan suara mereka, mereka dapat memperjuangkan perlindungan hak-hak individu yang mungkin terabaikan dalam dinamika kompleks perubahan global. peran masyarakat sipil dan LSM dalam mendukung dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional adalah esensial. Mereka tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menghadapi pelanggaran hak asasi

manusia, tetapi juga pembela nilai-nilai kemanusiaan. Melalui kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia, pemerintah, dan aktor internasional lainnya, mereka dapat membentuk dunia yang lebih adil, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua.

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional adalah tantangan yang kompleks dan terus berkembang di tengah dinamika masyarakat global. Hukum internasional memberikan kerangka kerja yang esensial untuk melindungi martabat dan kebebasan setiap individu, namun tantangan-tantangan dalam implementasinya memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk negara-negara anggota, lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, masyarakat sipil, dan LSM. Evolusi hukum internasional terkait hak asasi manusia mencerminkan kemajuan yang signifikan seiring waktu, dengan adopsi berbagai instrumen dan mekanisme penegakan hukum. Namun, tantangan muncul dari keterbatasan kepatuhan negara-negara terhadap norma-norma ini, impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan kompleksitas konflik dan krisis kemanusiaan.

Peran lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB, penting dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia di tingkat global. Namun, tantangan diplomatik, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari beberapa negara tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Masyarakat sipil dan LSM memiliki peran krusial dalam mendukung dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Mereka berfungsi sebagai penjaga, penegak hukum, dan advokat, menyuarakan isu-isu hak asasi manusia, memberikan bantuan hukum kepada korban, dan menjadi mitra konstruktif dalam membangun sistem yang lebih adil. Perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak. Dengan memahami tantangan dan memperkuat peran masing-masing stakeholder, dunia dapat terus mengarah pada visi universal di mana hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan diperjuangkan untuk setiap individu, tanpa kecuali.

#### REFERENSI

- [1] Putu Marta, Ni Putu Rai Yuliantini, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Oleh Unicef Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Kongo. *Ganesha Law Review*, 4(2), 84–92. <https://doi.org/10.23887/blr.v4i2.1430>
- [2] Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 208–219
- [3] Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- [4] Silalahi, R. A. (2021). Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i2.3045>
- [5] Dinata, A. W., & Akbar, M. Y. (2021). Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan selama Penyebaran Virus COVID-19 menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(2), 305. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.305-324>

- [6] Septia Renanda, V., Natasyafira, D., Julia Kusuma, A., Delia Reviska, Z., & Putri Winarti, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Internasional. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 143–152. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.510>
- [7] Aditya, R., Melani Putri, F., & Beru Perangin-Angin, R. B. (2022). Perlindungan Hukum Internasional atas Pelanggaran HAM terhadap Suku Papua dalam Kaum Indegenous di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 923–926.
- [8] Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yuliantini, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional. *Ganesha Law Review*, 4(2), 63–72. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1428>
- [9] Nyoman Krisnanta Davendra. (2022). Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia. *Ganesha Law Review*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1497>
- [10] Fitriani, A. I., Tarigan, R., & Putri, R. W. (2021). PENGATURAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun 1998). *Esensi Hukum*, 3(1), 55–66. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.59>